**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19
BAGI UMKM DI INDONESIA****Oleh****Ika Masruroh¹⁾, Rizky Andrean²⁾ & Frieda Arifah³⁾****^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan****Email: ikamasruroh6@gmail.com, rarizkyandrian@gmail.com &
& friedaarifah@gmail.com****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan dalam rangka menjelaskan peran pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan terkait penanganan implikasi pandemi Covid-19 bagi UMKM. Metode dalam penelitian ini merupakan studi empiris berupa telaah pustaka (*library research*) menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, digunakan data sekunder yang didapat dari kajian penelitian terdahulu dengan kesamaan topik bahasan penelitian. Adapun hasil riset menjelaskan pandemi Covid-19 menimbulkan dampak signifikan bagi UMKM. Di antaranya dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap tenaga kerja, dampak terhadap pelunasan kredit, dan dampak terhadap ketersediaan modal. Namun, pemerintah berupaya mengatasi dampak tersebut untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM. Di antaranya dengan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial.

Kata Kunci: Pemerintah, Pandemi &UMKM**PENDAHULUAN**

Kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak nyata terhadap berbagai sektor mulai dari persoalan ekonomi, perubahan kondisi sosial masyarakat, serta perubahan pola perpolitikan di setiap penjuru dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pembatasan aktivitas masyarakat melalui berbagai kebijakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak lain yaitu menyebabkan kerugian dari sisi perekonomian nasional. Aspek ekonomi yang terdampak spandemi Covid-19 di antaranya adalah sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor medis dan sektor-sektor lainnya. Aspek ekonomi paling terdampak oleh Covid-19 adalah sektor domestik (rumah tangga) mengingat sektor ini merupakan fundamental perekonomian (Sugiri, 2020). Sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka, perekonomian juga terkena imbas dari pandemi ini. Kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 2020 lalu jelas mengalami

penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi ini. Akibatnya kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya (Aziza Nur Auliya, 2021).

Kementerian Keuangan telah mengkaji bahwa kondisi pandemi menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kegiatan ekonomi domestik seperti menurunnya konsumsi penduduk dan daya beli masyarakat, menurunnya kinerja produksi dan keuangan perusahaan, adanya ancaman terhadap sektor perbankan dan keuangan lainnya, serta ancaman terhadap keberlangsungan UMKM. Dalam sisi konsumsi penduduk dan daya beli masyarakat, kondisi pandemi menimbulkan berkurangnya tenaga kerja secara signifikan yang kemudian menimbulkan hilangnya pendapatan sehingga mempengaruhi konsumsi penduduk dan daya beli masyarakat utamanya bagi mereka para pekerja di sektor informal dan para pekerja lepas. Mayoritas penduduk menjadi lebih selektif dalam

mengatur finansialnya di tengah ketidakpastian berakhirnya periode sulit ini. Tentunya, ini menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi mengalami penurunan serta para penjual dan produsen menjadi tertekan. Adapun dari sisi industri besar, perusahaan-perusahaan di tengah situasi pandemi ini kinerjanya menjadi terganggu, terutama bagi yang bergerak di bidang perdagangan, penyediaan jasa transportasi, dan sektor akomodasi pariwisata (*tourism*). Langkah pemberlakuan penjagaan jarak sosial yang selanjutnya berubah menjadi penjagaan jarak fisik untuk mencegah penularan dan penyebaran virus berupa bekerja dari atau bahkan di rumah (WFH) berimplikasi pada menurunnya kinerja perusahaan. Lebih parah lagi jika kemudian disertai dengan PHK. Tak sedikit perusahaan yang akhirnya pailit dan kemudian menutup usahanya. Dari sisi jasa perbankan dan jasa keuangan, kondisi pandemi yang terjadi saat ini menimbulkan kekhawatiran terhadap terjadinya problematika pelunasan hutang atau kredit akan berdampak negatif pada keberlangsungan kinerja sektor perbankan dan jasa keuangan. Sudah banyak kreditur yang memohon kelonggaran tenggat pembayaran serta besaran biaya cicilan hutang dan kredit. Selain itu para pengusaha juga harus mencermati ketidakstabilan kurs rupiah yang tentunya akan mengancam kinerja produksi terutama bagi perusahaan yang menggunakan bahan-bahan baku yang didatangkan dari luar negeri (*impor*). Pandemi ini juga menyebabkan kekhawatiran larinya investasi luar negeri di Indonesia yang ditakutkan akan mengganggu berbagai rencana pembangunan proyek strategis pemerintah. Dari sisi UMKM, pandemi menyebabkan berkurangnya permintaan yang menyebabkan berkurangnya pendapatan, pemberhentian karyawan, dan macetnya pembayaran kredit (Pakpahan, 2020)

UMKM adalah bagian usaha masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Keberadaan mereka dalam aktivitas ekonomi memberikan sumbangsih yang besar bagi perekonomian nasional. Mereka turut

berupaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Bahkan, mereka secara superior mendominasi usaha non-pertanian yang ada di negeri ini. Mengutip BPS pada tahun 2019 menunjukkan, di Indonesia ada sekitar 26 juta UMKM (kira-kira 98,68 persen) dari total usaha non-pertanian yang ada. UMKM ini menyerap lebih dari 59 juta orang tenaga kerja (kira-kira 75,33 persen) dari keseluruhan tenaga kerja sektor non-pertanian. Hal ini juga diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap tahunnya. (Kurnia, 2020).

UMKM adalah salah satu aspek yang memiliki urgensi bagi perekonomian negara, di antaranya adalah sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, salah satu aktor dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, sarana menuju ekonomi kerakyatan, penyerap tenaga kerja, penguat tatanan ekonomi domestik, serta berbagai sasaran social ekonomi lainnya dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemberdayaan UMKM adalah salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan, mengembangkan, serta memperkuat basis kehidupan perekonomian mayoritas rakyat Indonesia, terkhusus melalui pengurangan kesenjangan tingkat kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja (Leatemia, 2020).

Penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana dampak pandemi Covid-19 bagi UMKM di Indonesia serta peran pemerintah dalam mengatasi dampak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan jawaban guna mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia serta bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi dampak tersebut.

LANDASAN TEORI

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah salah satu wujud usaha dimana dijalankan secara perorangan ataupun secara badan usaha serta mempunyai persyaratan tertentu dalam klasifikasi jenis bidang usahanya. Klasifikasi UMKM

dijabarkan dan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 yaitu:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang independen, yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari anak perusahaan ataupun cabangnya. mempunyai syarat yaitu kekayaan maksimal Rp 500 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2,5 milyar.
3. Usaha menengah adalah usaha produktif yang independen, dibawah pengelolaan perorangan maupun secara badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabangnya. Mempunyai syarat yaitu jumlah kekayaan maksimal Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tersebut serta mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50 milyar.

UMKM sebagai bentuk usaha yang mendominasi di Indonesia perlu diperhatikan secara khusus mengingat kontribusinya yang besar dan nyata terhadap perekonomian nasional. Setidaknya terdapat beberapa peran UMKM bagi perekonomian nasional antara lain sarana mengurangi angka kemiskinan, sarana pemerataan ekonomi bagi rakyat kecil, serta memberikan kontribusi berupa devisa negara dari aktivitas ekspor (Natasya, 2021).

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran dalam meregulasi aktivitas perekonomian agar kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi sebagai tulang punggung kehidupan turut menjadi tanggung jawab pemerintah. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat direfleksikan melalui intervensi ekonomi

yang dilakukan oleh pemerintah. Secara definisi, peran pemerintah ialah suatu tindakan dari instansi atau lembaga pemerintahan untuk melaksanakan kewajiban sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi mereka. adapun peran dari pemerintah dalam mengembangkan UMKM di antaranya ialah peran pemerintah sebagai regulator bagi UMKM, peran pemerintah sebagai katalisator bagi UMKM, serta peran pemerintah sebagai fasilitator bagi UMKM. Peran pemerintah bagi UMKM tersebut diharapkan dapat mempermudah bagi UMKM untuk dapat maju dan berkembang dalam usahanya (Rahmah, 2020)

METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan secara deskriptif kualitatif. penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari artikel, buku, internet maupun sumber lainnya yang relevan dengan hal yang diteliti. Studi kepustakaan (*research library*) digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Pemahaman dan analisa sumber Pustaka digunakan untuk menghasilkan kajian tentang topik yang dibahas serta menarik kesimpulan penelitian agar mendapat penjelasan atas gejala atau fenomena yang coba diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia**

Kondisi pandemi Covid-19 berdampak sangat besar bagi sektor perekonomian local suatu negara termasuk bagi sektor usaha. UMKM yang menjadi dominasi skala usaha di Indonesia serta statusnya yang menjadi *backbone* perekonomian nasional tidak hanya mengalami dampak signifikan dari sisi nilai produksi dan perdagangan secara keseluruhan, tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerjanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkop-UKM terdapat kira-kira 37 ribu UMKM yang melaporkan kondisi pandemi telah menimbulkan kerugian bagi usaha

mereka. Sebesar 56 persen UMKM menyatakan mengalami penurunan penjualan, sebesar 22 persen menyatakan mengalami masalah pada sisi permodalan dan pembiayaan, sebesar 15 persen menyatakan mengalami masalah dalam hal pendistribusian produk, serta sebesar 4 persen menyatakan mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku mentah (Pakpahan, 2020). Menurut data yang dirilis, kesulitan yang dihadapi oleh usaha kecil, menengah dan mikro selama pandemi dibagi menjadi empat masalah. Pertama, karena penurunan aktivitas masyarakat selain konsumen, penjualan turun. Kedua, penurunan tingkat penjualan telah menyebabkan kesulitan dalam perputaran modal. Ketiga, peredaran produk di beberapa daerah dibatasi, dan ada hambatan peredaran produk. Keempat, kesulitan bahan baku, karena sebagai usaha kecil menengah, dari sektor industri lainlah mereka mengandalkan pasokan bahan baku. (Sugiri, 2020)

Di era pandemi Covid-19, kelemahan para pelaku usaha kecil, menengah dan mikro dapat dikatakan disebabkan oleh berbagai keputusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran kasus infeksi Covid-19, antara lain dengan pemberlakuan PSBB (pembatasan social berskala besar), Gerakan mengurangi mobilitas dengan di rumah saja, serta bekerja dari rumah. Oleh karena itu, situasi ini membawa konflik kepentingan antara semua bentuk ekonomi dan pelaku UMKM. Merujuk pada Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, pembatasan sosial berskala besar mencakup segala bentuk pembatasan aktivitas tertentu masyarakat di wilayah yang diduga menjadi zona yang terjangkit Covid-19, mencakup juga pembatasan terhadap pergerakan barang dan/atau orang ke tempat tertentu dalam wilayah se-provinsi satau se-kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran covid-19. (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020)

Pembatasan sosial dilakukan dengan menutup tempat usaha dan lembaga pendidikan, membatasi aktivitas keagamaan, dan membatasi aktivitas di ruang publik. Akibat pemberlakuan kebijakan pembatasan tersebut, kegiatan perekonomian khususnya aspek produksi, distribusi dan pemasaran menjadi terganggu, yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap kinerja usaha kecil, menengah dan mikro serta perekonomian nasional. Jika dilihat dari data yang dihimpun oleh BPS menjabarkan bahwa tingkat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 61,41 persen pada tahun 2018 lalu. Besarnya kontribusi ini menegaskan peran UMKM sebagai *backbone* penopang ekonomi nasional.

Peran Pemerintah dalam upaya Penyelamatan UMKM dimasa Pandemi Prioritas Dukungan

Dalam proyek strategis Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 untuk merespon implikasi kerugian pandemi ini, pemerintah mengutamakan dukungan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu terlihat dari keberadaan pengalokasian anggaran yang dikhususkan untuk memberikan dukungan UMKM selama pandemi. Pada tahun 2020, anggaran untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun, yang dimana sebesar Rp 123,46 triliun dikhususkan dalam memberikan dukungan bagi UMKM. Besarnya anggaran tersebut teralokasi dalam 5 hal, yaitu:

1. Sebesar Rp 35,28 triliun untuk subsidi bunga
2. Sebesar Rp 78,78 triliun untuk penempatan dana guna restrukturisasi
3. Sebesar Rp 5 Triliun untuk belanja imbal jasa penjamin (IJP)
4. Sebesar Rp 2,4 Triliun untuk PPH akhir UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP)
5. Sebesar Rp 1 Triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana

Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Banyaknya kementerian yang menangani masalah UMKM pada kondisi pandemi juga menjadi bukti prioritas dukungan yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Selain Kemenkop dan UMKM, berbagai kementerian juga mempunyai program yang dikhususkan bagi UMKM, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian PUPR serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Restrukturisasi Kredit UKM

Dukungan pemerintah terhadap para pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19, terbagi menjadi 3 golongan kebijakan yaitu, pemberian kredit modal kerja, melakukan restrukturisasi kredit UMKM, serta pemberian berbagai bentuk dukungan lain guna membantu UMKM yang terdampak. Berbagai dukungan ini dilaksanakan oleh pemerintah bekerja sama dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta BI (Bank Indonesia). Bantuan kebijakan restrukturisasi kredit bagi para UMKM dilaksanakan melalui penundaan pokok dan subsidi bunga serta relaksasi penilaian kualitas aset. Kredit Modal Kerja Berbunga diberikan sebagai bantuan kebijakan modal kerja dengan pemberian penjamin kepada Jamkrindo dan Askkrindo sedangkan dukungan lain terhadap UMKM dilaksanakan berupa pemberian bantuan insentif PPH final UMKM yang ditanggung pemerintah serta pemberian (batuan presiden produktif usaha mikro)

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 dan 14/PJOK.05/2020, restrukturisasi kredit yang pertama bagi UMKM dilaksanakan melalui relaksasi penilaian terhadap kualitas dari aset UMKM. Hal tersebut pada kredit hingga Rp 10 milyar dapat hanya dilandaskan pada kesesuaian dalam pelunasan pokok atau bunga. Di samping itu, dilaksanakan pula restrukturisasi kredit, yaitu kredit dari debitur

UMKM yang terdampak Covid-19 ditetapkan sejak direstrukturisasi dan dilaksanakan tanpa terbatas pada klasifikasi pembiayaan.

Ada 4 golongan yang akan memperoleh bantuan subsidi margin maupun bantuan subsidi bunga. Pertama, mempunyai baki debit pembiayaan atau kredit. Kedua, tidak masuk dalam *blacklist* nasional. Ketiga, termasuk dalam kriteria *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau 2). Yang keempat, mempunyai NPWP atau sedang medaftar untuk memperoleh NPWP. Kemudian terdapat juga relaksasi syarat administratif dan akselerasi pemberian kredit melalui kebijakan untuk Kredit Ultra Mikro (UMI). Penyaluran kredit UMI ini dilaksanakan lebih massif dan disertai dengan jaminan akan kemudahannya. Pelaku ekonomi yang mempunyai pinjaman online, petani, koperasi, UMKM, serta LPM UKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) memperoleh relaksasi subsidi bunga sebesar 6% dalam waktu 6 bulan (Gitiyarko, 2020).

Kredit Modal Kerja

Kebijakan modal kerja dilaksanakan dengan memberikan kredit modal kerja dengan bunga yang rendah, melalui bentuk deposito atau giro atas penempatan uang negara. Diketahui bahwa pemerintah melakukan penempatan dana senilai 30 triliun rupiah di bank mitra pemerintah dalam waktu 6 bulan. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan mempercepat pemberian pinjaman, terkhusus pada UMKM dan jenis industri padat karya guna percepatan pemulihan ekonomi nasional terutama pada golongan masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 yang sudah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020.

Empat kriteria ditetapkan oleh pemerintah pada bank mitra yang akan ditempatkan dana. Pertama adalah izin usahanya masih dalam masa berlaku. Kedua,

aktivitas usahanya berada di wilayah Indonesia dan sebagian kepemilikannya merupakan warga negara atau badan hukum Indonesia atau bahkan juga pemerintah. Ketiga, tingkat kesehatannya telah diverifikasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan kriteria minimal adalah komposit 3. Keempat, melakukan aktivitas perbankan yang mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, yaitu melakukan perluasan kredit kepada debitur koperasi dan UMKM serta memberikan pelayanan dan dukungan pembiayaan secara nyata kepada lembaga keuangan yang melaksanakan perluasan kredit kepada debitur berupa koperasi dan UMKM.

Digitalisasi UMKM

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian. hal ini membuat para pelaku ekonomi dituntut untuk banyak berinovasi dalam mempertahankan bisnisnya. Perkembangan teknologi menuntut kita untuk terus berinovasi. Masyarakat saat ini dihadapkan dengan era digital sehingga sebagian bentuk kegiatan sosial juga beralih pada sistem digital. Saat ini strategi marketing sudah beralih pada dunia teknologi. Berbagai macam platform yang menawarkan kemudahan untuk memasarkan produk UMKM, diantaranya media sosial (facebook, Instagram, line WhatsAap), market palce (bukalapak, shopee) dan masih banyak lagi (Arifqi, 2021).

Perubahan ke arah digital dapat membantu UMKM agar dapat tetap eksis sekaligus memperoleh keuntungan. Kementerian Koperasi dan UKM sudah merumuskan strategi-strategi untuk melakukan upaya pengembangan digitalisasi UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM telah mempunyai 4 tahap strategi dalam rangka mengembangkan digitalisasi UMKM, yaitu: Pertama, peningkatan SDM agar kemampuannya dapat meningkat. Kedua, melakukan intervensi pada perbaikan proses bisnis dari UMKM yang dirumuskan ke dalam

beberapa program produktif. Ketiga, memperluas akses pemasaran yang mana salah satunya Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Rahma, 2020).

Insentif Pajak

Insentif pajak adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada perorangan maupun organisasi untuk mempermudah dan menstimulus para wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Insentif pajak (*tax incentive*) merupakan suatu solusi kemudahan dari pemerintah dengan memanfaatkan pajak untuk suatu kegiatan tertentu, misalnya kontribusi atas uang atau harta lainnya guna aktivitas yang produktif. Pemberlakuan *tax incentive* adalah suatu hal yang berimplikasi positif dan merupakan keuntungan tersendiri bagi para pelaku bisnis. Dengan adanya insentif pajak itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh pengusaha sebagai pelaku ekonomi menjadi semakin meningkat. Pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dituangkan dalam PMK No. 86 Tahun 2020. Insentif pajak dapat dilakukan dengan mengajukan secara langsung maupun permohonan secara daring melalui website www.pajak.go.id (Natasya, 2021).

Bantuan Sosial

Bansos (Bantuan Sosial) diberikan oleh pemerintah bagi pelaku UMKM yang mengalami masalah permodalan di dalam menjalankan usahanya. Pemberian bantuan sosial dilakukan secara langsung melalui rekening pelaku UMKM tersebut dengan perantara bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Di samping kebijakan bantuan sosial secara langsung dan adanya pendampingan bagi para pelaku UMKM, pemerintah Indonesia melalui Presiden mengeluarkan Perpres No. 76 Tahun 2020 yang mengubah peraturan sebelumnya

yaitu Perpres No. 36 Tahun 2020. Salah satu wujud perubahannya terletak pada maksud dan tujuan dari program kartu pra-kerja. Dimana kartu pra-kerja semula dikhususkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kini dapat digunakan sebagai modal usaha. Tujuannya untuk memunculkan dan mengoptimalkan jiwa kewirausahaan bagi para penerima manfaat karena melalui program kartu pra-kerja, para pelaku UMKM dapat melakukan registrasi kartu pra-kerja tersebut (Adlan, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Konsisi pandemi Covid-19 menimbulkan dampak pada seluruh sektor perekonomian di Indonesia tak terkecuali pada para pelaku UMKM. Padahal, diketahui bahwa UMKM adalah salah satu sektor utama dalam menopang perekonomian nasional karena kontribusinya sangat signifikan. Dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM di antaranya dampak terhadap pendapatan, dampak terhadap tenaga kerja, dampak terhadap pelunasan kredit, dan dampak terhadap ketersediaan modal. Namun, pemerintah tetap berupaya mengatasi dampak tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM di Indonesia. Di antaranya dengan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial. Sederet langkah tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif untuk mempertahankan eksistensi UMKM di tengah kondisi pandemi.

Saran

Dampak pandemi Covid-19 secara nyata pada sektor perekonomian termasuk sektor UMKM perlu terus mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah. Pemerintah perlu melakukan berbagai tinjauan kebijakan produktif lainnya serta melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang dirumuskannya dalam mengatasi dampak pandemi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang di antaranya disebabkan oleh kurangnya kapabilitas dalam menguraikan fenomena yang menjadi topik dan permasalahan dalam penelitian. Hasil dan pembahasan juga masih cenderung bersifat umum dan kurang dapat memberikan paparan yang lebih komprehensif. Tentunya, masih terdapat aspek lain yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, harapannya pada penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan lebih baik daripada penelitian kali ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adlan, Muhamad Aqim. (2021). Peran Pemerintah dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, (8) 1, 81-104.
- [2] Arianto, Bambang. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis*, (6) 2, 233-247.
- [3] Arifqi, Moh. Musfiq. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (3) 2, 192-205.
- [4] Atika Rahma. (2020). 4 Juru Pemerintah Kembangkan Digitalisasi UMKM, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/440612/4-jurus-pemerintah-kembangkan-digitalisasi-umkm>
- [5] Auliya, Aziza Nur., & Arif, Lukman. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi*, (8) 1, 22-31.
- [6] Gitiyarko, Vincentius. (2020). Kebijakan Perlindungan dan Pemulihan UMKM di tengah Pandemi Covid-19. <http://kompaspedia.lompas.id/baca/papara-topi/kebijakan-perlindungan->

[danpemuliah-umkm-di-tengah-pandemi-covid19](#)

- [7] Kemenkop-UKM. (201). *Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar*. [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf)
- [8] Kurnia, Candra Adi. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 dan Perubahan Pola Administrasi terhadap Pelaku UMKM Ekspor dan Impor. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, (6) 1, 1-12.
- [9] Leatemia, Senda Yunita. (2020). Adopsi *E-Commerce* pada UMKM di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosoq*, (8) 2, 1-11.
- [10] Natasya, Vina., & Hardiningsih, Pancawati. (2021). Kebijakan Pemerintah sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, (5) 1, 141-148.
- [11] Pakpahan, A. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64.
- [12] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
- [13] Sugiri, Dani. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis*, (19) 1, 76-86.